

BPK Didesak Belejeti Tanjung Bonang

REMBANG- Setelah bekerja sekitar enam bulan sejak April lalu, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Rembang yang membahas permasalahan Pelabuhan Tanjung Bonang akhirnya menerbitkan 10 butir rekomendasi atas pelabuhan setempat.

Rekomendasi pansus disampaikan pada rapat paripurna DPRD Rembang, Jumat (16/10) siang. Ketua Pansus Puji Santoso memaparkan 10 rekomendasi itu, antara lain agar Pemkab segera meminta BPKP Jawa Tengah untuk melakukan audit investigasi.

Audit itu agar dilakukan secara menyeluruh atas lahan reklamasi yang ada di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke. Selain itu, Pemkab Rembang agar meminta Kantor UPP untuk mengajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar segera mengesahkan RIP, DLKp, dan DLKr.

“Pemkab agar segera memastikan HPL atas tanah hasil reklamasi di Tanjung Bonang atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang. Selanjutnya, Pemkab agar memfasilitasi terbentuknya konsorsium badan usaha kepelabu-

hanan,” ujar Puji Santoso

Konsorsium Badan Usaha Pelabuhan yang dimaksud, imbuh Puji, terdiri dari para investor yang telah berinvestasi di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, yakni PT BAK, PT PRK, PT BRTK, PT AHK/SBAP, dan PT RBSJ. BUMD PT RBSJ direkomendasikan mendapat persentase saham dalam pembentukan konsorsium itu.

Rekomendasi lainnya adalah Pemkab agar segera memberikan HGB di atas HPL setelah terbentuknya konsorsium yang difasilitasi oleh Pemkab Rembang.